



SUMBER BERITA

SENIN, 29 JUNI 2020

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Potensi KN di Dinas PUPR Rp 800 Juta

Temuan Audit BPK Tahun 2019

KOTA MANNA - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan ada potensi Kerugian Negara (KN), Rp 800 juta di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Potensi KN itu lewat kelebihan bayar pada pekerjaan fisik tahun 2019. Untuk itu Dinas PUPR akan berkoordinasi dan menyerahkan temuan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah tegas ini diambil agar para rekanan bisa segera melunasi kelebihan bayar tersebut. Sebab jumlah Rp 800 juta tersebut tergolong besar. Dalam waktu dekat, Dinas PUPR BS akan bersurat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) BS Bidang Perdata, Tata Usaha Negara (Datun).

Kepala Dinas PUPR BS Nuzmanto M. Aidil saat dikonfirmasi, menyebutkan dari tiga bidang yang ada di Dinas PUPR BS, Bidang Bina Marga yang menjadi temuan BPK sebesar Rp 800 juta. Sementara untuk Bidang

Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas PUPR BS masih menunggu hasil audit keluar.

"Ya yang pastinya rencana limpahkan ke APH, dalam hal ini pihak Kejari BS. Sebab angka Rp 800 juta bukan sedikit," terang Nuzmanto

Menanggapi temuan BPK RI tersebut pihak DPRD BS berharap pihak rekanan dapat mengembalikan dan melunasi kelebihan bayar. Sehingga yang diuntungkan adalah Pemda BS dan uang tersebut bisa bermfaat untuk lainnya.

"Harapan kami sebagai wakil rakyat ya selesaikanlah itu, nanti Pemda juga yang untung. Intinya rekanan fair lah," ujar Ketua Komisi III DPRD BS Holman, SE. (tek)